

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENGANTAR HUKUM TATA USAHA (ADMINISTRASI) NEGARA	1
A. PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA	1
1. Istilah dan Definisi Administrasi	1
2. Istilah dan Definisi Negara	2
B. KONSEP HUKUM TATA USAHA (ADMINISTRASI) NEGARA	4
1. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi	4
2. Subjek dan Objek Hukum Administrasi	9
3. Pendekatan	12
4. Landasan Hukum Administrasi	13
C. KODIFIKASI DI BIDANG HUKUM ADMINISTRASI	14
1. Istilah dan Pengertian	14
2. Lapang Pandang Hukum Administrasi Berdasarkan Kodifikasi	15
3. Perkembangan Pemerintahan Umum di Masa Depan	20

D. INTERRELASI HUKUM ADMINISTRASI DENGAN CABANG ILMU PENGETAHUAN LAIN	21
1. Interrelasi Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara	22
2. Interrelasi Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Tata Pemerintahan	23
3. Interrelasi Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara	24

BAB II SUMBER HUKUM TATA USAHA (ADMINISTRASI) NEGARA 27

A. KONSEP SUMBER HUKUM	27
1. Istilah Sumber Hukum	27
2. Pengertian Sumber Hukum	29
B. SUMBER-SUMBER HUKUM MENURUT SISTEM <i>CIVIL LAW</i> DAN <i>COMMON LAW</i>	30
1. Sumber Hukum Menurut <i>Civil Law</i>	30
2. Sumber Hukum Menurut <i>Common Law</i>	33
C. SUMBER HUKUM FORMIL DAN MATERIIL HUKUM TATA USAHA ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA..	33
1. Sumber Hukum Materiil Pancasila	34
2. Sumber Hukum Formil	36

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT HUKUM ADMINISTRASI 55

A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI LUAS	57
1. Kedudukan, Fungsi, dan Hubungan Antar-Kelembagaan Negara	58
2. Kekuasaan Legislatif	64
3. Kekuasaan Yudisial	82
4. Kekuasaan Eksaminatif	105

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI SEMPIT	107
1. Presiden	109
2. Wakil Presiden	117
3. Menteri-Menteri	117
C. KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY BODIES) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA	117
1. Kedudukan Komisi Negara Independen (Independent Regulatory Agencies)	124
2. Kedudukan Komisi Negara Eksekutif (Executive Branch Agencies)	137
3. Kedudukan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (IPNK)	143
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT HUKUM ADMINISTRASI	195
A. PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT UUD 1945	195
1. Asas Sentralisasi	199
2. Asas Desentralisasi	211
B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	215
1. Otonomi Daerah	216
2. Otonomi Khusus	218
C. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH	231
1. Kepala Daerah	231
2. DPRD	242
D. PEMERINTAHAN DESA	249
1. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa	249
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	253

BAB V FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK	261
A. PENDAHULUAN.....	261
B. EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM KONSEPSI WELFARE STATE INDONESIA	264
1. Konsep Good Governance.....	264
2. General Principles of Good Governance	280
3. Tindakan Pemerintah dalam Negara Hukum	288
C. FUNGSI-FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI	299
1. Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara.....	300
2. Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara	301
3. Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara	303
D. AKTUALISASI FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK	304
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.....	304
2. Upaya Meningkatkan Pemerintahan yang Baik.....	305
BAB VI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	
A. TINDAKAN HUKUM PEJABAT TATA USAHA NEGARA	307
1. Tindakan Hukum Pemerintah	307
2. Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara.....	312
B. KONSEP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	314
1. Istilah Keputusan Tata Usaha Negara	314
2. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	316
3. Ciri-Ciri Keputusan Tata Usaha Negara.....	319
4. Batal atau Tidak Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara	322
5. Macam-Macam Keputusan Tata Usaha Negara.....	325
C. KEPUTUSAN TATA USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986.....	332

BAB VII PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM ADMINISTRASI	339
A. KONSEP PENEGAKAN HUKUM	339
1. Hakikat Penegakan Hukum	339
2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum	344
3. Aparat Penegak Hukum	348
4. Tugas dan Keputusan Hakim	352
5. Tugas Pengacara, Jaksa, dan Polisi	354
6. Pelaksanaan Penegakan Hukum	358
B. PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM ADMINISTRASI	361
1. Penegakan Hukum Administrasi	361
2. Perlindungan Hukum	362
BAB VIII HARTA KEKAYAAN NEGARA/DAERAH DI INDONESIA	365
A. KONSEP HARTA KEKAYAAN NEGARA INDONESIA	367
1. Istilah Kekayaan Negara di Indonesia	367
2. Pengertian	367
B. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEUNGAN NEGARA	373
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	373
2. Keuangan Negara	382
C. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA/BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (BMN/D)	385
1. Konsep Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Menurut Hukum Administrasi	387
2. Pengaturan Pengelolaan BMN/D di Indonesia	398
3. Langkah Strategis Pegelolaan Kekayaan Negara di Indonesia	402

BAB IX PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH	407
A. PENDAHULUAN.....	407
B. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.....	409
1. Elemen Formal/Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah	410
2. Elemen Materiil Pembentukan peraturan daerah.....	416
C. MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERDA....	419
1. Pengawasan Perda	419
2. Pembatalan Perda	425
D. KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA.....	428
1. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia	429
2. Kedudukan Peraturan Daerah Menurut Pendapat Para Ahli Hukum.....	437
3. Kedudukan Peraturan-Peraturan Lain di Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi dan Tugas Pembantuan.....	439
BAB X SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	445
A. KONSEP PENGAWASAN	446
1. Istilah dan Pengertian.....	446
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan	451
3. Tipe Pengawasan.....	454
4. Macam Teknik Pengawasan	456
5. Proses Pengawasan	460
B. BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	468
1. Pengawasan Produk Hukum dan Kebijakan	468
2. Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	471

3. Pengawasan Keuangan Daerah	475
4. Pertanggungjawaban Kepala Daerah.....	478
BAB XI KEDUDUKAN HUKUM PENYELENGGARA KEPENTINGAN UMUM (PUBLIC SERVANTS)	481
A. PARA PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT POLITIK (POLITICAL OFFICE HOLDERS).....	482
B. PEGAWAI NEGERI	484
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	485
2. Anggota TNI	517
3. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	520
C. STATUS KEPEGAWAIAN PARA HAKIM.....	526
D. PEGAWAI BUMN.....	532
BAB XII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	537
A. TINJAUAN UMUM APBD	537
B. PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	539
1. Sistem anggaran di Indonesia	539
2. Mekanisme Penyusunan APBD	540
C. PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	542
1. Pendapatan Daerah	542
2. Belanja Daerah	551
3. Kemampuan Daerah dalam Membiaya Belanja Daerah	553
BAB XIII PERADILAN TATA USAHA NEGARA	557
A. ORGANISASI DAN LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA	557
1. Organisasi Peradilan di Indonesia	557
2. Lingkungan Lembaga Peradilan	559

B. KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....	566
1. Sejarah Singkat Pembentukan Paradilan Tata Usaha Negara	566
2. Ruang Lingkup Paradilan Tata Usaha Negara	567
3. Tugas dan Wewenang Paradilan Tata Usaha Negara	572
4. Kompetensi Absolut Paradilan Tata Usaha Negara.....	580
BAB XIV HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	585
A. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	
1. Istilah dan Pengertian	585
2. Perbedaan Hukum Acara Tata Usaha Negara dengan Hukum Acara Perdata	588
3. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	589
B. PENGAJUAN PERMOHONAN DAN GUGATAN.....	593
1. Pengertian Pengajuan Permohonan Gugatan	593
2. Pengertian Gugatan.....	593
3. Pengajuan Gugatan	594
4. Beberapa Hal yang Penting dan Pokok dalam Pembuatan Gugatan.....	596
C. PEMBUKTIAN	598
1. Pengertian dan Prinsip Pembuktian	598
2. Kedudukan Alat Bukti	605
D. PUTUSAN PENGADILAN	611
1. Pengertian Putusan	611
2. Jenis Putusan dan Fungsinya	613
3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	614
E. UPAYA HUKUM.....	615
1. Upaya Hukum Biasa	615
2. Upaya Hukum Istimewa.....	621

